

**IMPLICATIONS JURISDICTION OVER AGENCY / STATE
ADMINISTRATION OFFICIALS ARE NOT IMPLEMENTING
DECISION PTUN
(Study Kemenpora policy of freezing PSSI)**

By :

SEPTITA SILVIANA PUTRI

1. ABSTRACT

On the basis of the problems found from a case of freezing the PSSI by the Ministry of Youth and Sports, which essentially contains administrative sanction to the Football Association of Indonesia, hereinafter referred to PSSI Administrative Sanctions in the form of sports activity in question is not recognized. PSSI feel aggrieved over the freezing letter, then PSSI filed a lawsuit to the court TUN since dikeluarkannya or enactment of Decree of Affairs. In its decision of the State Administrative Court ordered the Minister of Youth and Sport immediately revoke the decree freezing posted to PSSI. But with the time period specified by the administrative court for 4 months, exceeding the time limit Kemenpora never revoke the decree. Therefore, researchers wanted to know how the juridical implications of the Board / Administrative Officers who do not carry out the administrative court ruling. The purpose of this study was to determine and assess what are the implications of juridical bodies / officials of the state administration which do not implement the decision of the Administrative Court. The method used is the method of approach to the problem by using (approach legislation, case approach and conceptual approach), the type of research used normative juridical, legal materials used (primary, secondary and tertiary), method of collection of legal materials in a way (study literature), methods of analysis of legal materials used (qualitative and deductive method).

Keywords: juridical implications, Board / Administrative Officer, Court decision state administration.

**IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP BADAN/PEJABAT TATA
USAHA NEGARA YANG TIDAK MELAKSANAKAN
PUTUSAN PTUN
(Studi kebijakan Kemenpora tentang pembekuan PSSI)**

Oleh :

SEPTITA SILVIANA PUTRI

**Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember,
Jl. Karimata No. 49**

Email : Silviana.septita@gmail.com

1. ABSTRAK

Atas dasar permasalahan yang ditemukan dari sebuah kasus pembekuan PSSI oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga yang pada intinya berisi pengenaan sanksi administratif kepada Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia, yang selanjutnya disingkat Sanksi Administratif kepada PSSI berupa kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui. PSSI merasa dirugikan atas surat pembekuan tersebut, kemudian PSSI mengajukan gugatannya ke pengadilan TUN sejak dikeluarkannya atau ditetapkannya SK dari Menpora. Dalam putusannya Pengadilan Tata Usaha Negara memerintahkan Menteri Pemuda dan Olahraga segera mencabut SK pembekuan yang dilayangkan kepada PSSI. Namun dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh PTUN selama 4 bulan, hingga melebihi batas waktu Kemenpora tak kunjung mencabut SK tersebut. Oleh sebab itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana Implikasi Yuridis terhadap Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak melaksanakan putusan PTUN. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana implikasi yuridis badan/pejabat tata usaha negara yang tidak melaksanakan putusan PTUN. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode pendekatan masalah dengan menggunakan (pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual), jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif, bahan hukum yang digunakan (primer, sekunder dan tersier), metode pengumpulan bahan hukum dengan cara (studi kepustakaan), metode analisis bahan hukum yang digunakan (kualitatif dan metode deduktif).

Kata kunci : Implikasi Yuridis, Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, putusan PTUN.